

**PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA DESA TOMPO BULU KECAMATAN BALOCCI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**LOCAL COMMUNITY PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT OF
TOURISM OBJECTS IN TOMPO BULU VILLAGE BALOCCI DISTRICT
PANGKAJENE AND ISLANDS REGENCY**

SKRIPSI

NURUL UTAMI

E031181329



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

**PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA DESA TOMPO BULU KECAMATAN BALOCCI
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

SKRIPSI

NURUL UTAMI

E031181329



**SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA
MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA DEPARTEMEN
SOSIOLOGI**

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DESA TOMPO BULU
KECAMATAN BALOCCI KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN
NAMA : NURUL UTAMI
NIM : E031181329

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Sultan, S. Sos, M.Si
NIP. 196912312008011047



Musrayani Usman, S. Sos, M. Si
NIP. 198405242019032011

Mengetahui,

Ketua Departemen Sosiologi

FISIP UNHAS



Prof. Hasbi Marissangan, M.Si. Ph.D
NIP. 196308271991031003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Oleh

NAMA : NURUL UTAMI

NIM : E031181329

JUDUL : PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DESA TOMPO BULU
KECAMATAN BALOCCI KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN

Pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 03 Februari 2023

Tempat : Ruang Rapat Departemen Sosiologi FISIP Unhas

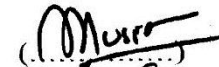
Tim Evaluasi Skripsi

Ketua : Sultan, S.Sos, M.Si



(.....)

Sekretaris : Musrayani Usman, S.Sos, M.Si



(.....)

Anggota : Dr. Muh. Iqbal Latief, M.Si



(.....)

Andi Nurlela, S.Sos, M.Si



(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NURUL UTAMI
NIM : E031181329
JUDUL : PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DESA TOMPO
BULU KECAMATAN BALOCCI KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menyatakan skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 03 Februari 2023



Nurul Utami

HALAMAN PERSEMBAHAN

Anda adalah sosok terbaik, yang tidak bisa tetap acuh pada masalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Betapa beruntungnya saya dilahirkan oleh anda.

Skripsi ini saya persembahkan untuk anda.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim.....

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul ***“Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Objek Wisata Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan”*** ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Kepada Bapak **Sultan, S.Sos., M.Si** selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I, terimakasih atas kepercayaan, kesabaran dan bimbingannya selama ini, tanpa lelah membimbing dan mengarahkan bagaimana menulis dan menyusun skripsi yang benar. Kepada Ibu **Musrayani Usman, S.Sos., M.Si** selaku Pembimbing II penulis, terimakasih untuk setiap waktu yang telah diluangkan dan tanpa lelah membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, bapak **Abd. Asis Bahasang** dan mama **Murniati** (almh) yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan mendukung penulis dalam proses menuntut ilmu serta kasih sayang yang diberikan untuk penulis, terima kasih.

2. Saudara-saudara penulis, kak **Hajar**, kak **Irmayani**, abang **Akbar Ab**, kakak **Aswandi** yang selalu menjaga, membantu dan mendukung penulis sehingga tetap kuat dan dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih.
3. **Popi Wulandari** adik penulis tersayang dan tercinta, terima kasih telah menjadi teman, tempat berkeluh kesah, dan pendengar yang baik untuk penulis. Semangat menuntut ilmunya, ditunggu kabar baiknya.
4. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
5. **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. **Prof. Hasbi R, M.Si., Ph.D** selaku Ketua Departemen Sosiologi dan **Dr. M. Ramli AT, M.Si** selaku Sekretaris Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
7. **Bapak dan Ibu Dosen** yang telah mendidik penulis selama menempuh pendidikan di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. **Semua Staf karyawan FISIP Unhas dan Departemen Sosiologi** yang telah memberikan bantuan selama menjadi mahasiswa. Terutama **Pak Pasmudir, Ibu Rosnaeni** dan **Pak Dayat** yang memberi penulis kemudahan dalam pengurusan berkas.
9. **Kemasos FISIP Unhas** yang menjadi tempat penulis belajar dan bertemu dengan orang-orang yang hebat.

10. **Positivis 18**, terima kasih karena telah kebersamai selama kurang lebih empat tahun ini baik dalam suka dan duka. Semoga trip ke Balocci Pangkep segera terlaksana.
11. **Positivis South to North (lia, dila, lea Julia, ratih, nanda, vinan, femi, fikri, herul dan adhit)** yang selalu menjadi sumber tawa dan sumber informasi penulis.
12. **Lia**, terima kasih untuk masa perkuliahannya dan selalu membantu penulis dalam bentuk apapun. Terima kasih telah mempercayai penulis untuk berbagi cerita tentang segala hal, panjang umur pertemanan.
13. Kak **Winda, Anugrah, Ashila** yang penulis sayangi dan yang selalu direpotkan, terima kasih untuk dukungan dan hiburannya setiap hari.
“adakah acara?”
14. **Husnul Khatimah, Rifda Qutrattunnada, Anisa Abdullah** sahabat penulis yang selalu kebersamai sejak SMK hingga sekarang, sukses buat semuanya. Dan **Adnan Yusuf** terima kasih telah membantu dan menemani penulis selama penelitian, semangat kuliahnya.
15. Keluarga besar **H. Bahasang** dan **Hj. Hindong** serta keluarga besar **Ruma Dg. Takka** dan **Jawaria Dg. Caya**, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang diberikan untuk penulis, hal-hal baik memhampiri. *aamiin*
16. **Teman-teman KKN Wajo 1, Posko Kecamatan Sabbangparu** yang telah menemani, banyak membantu dan berbagi pengalaman di Wajo selama pelaksanaan kegiatan KKN.
17. **Semua orang** yang membaca skripsi ini. Terima kasih.

Penulis menyadari bahwa selama menjadi mahasiswa banyak melakukan kesalahan dan skripsi inipun masih jauh dari kata sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perjalanan akademis penulis selanjutnya. Terima kasih.

Makassar, 27 Januari 2023

Nurul Utami

ABSTRAK

Nurul Utami, E031181329 “Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Objek Wisata Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan”, Dibimbing oleh Sultan, S.Sos., M,Si dan Musrayani Usman, S,Sos., M.Si. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan objek wisata di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci Kabupaten, Pangkajene dan Kepulauan. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan September 2022 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik penentuan sampel yang digunakan adalah sampel acak sederhana (*simple random sampling*). Teori yang digunakan adalah teori partisipasi menurut Arnstein (1969).

Hasil penelitian ini mengungkapkan keterlibatan masyarakat desa Tompo Bulu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Bentuk partisipasi masyarakat desa Tompo Bulu dalam pengembangan objek wisata. Manfaat yang dirasakan masyarakat desa Tompo Bulu dengan adanya pengembangan objek wisata tersebut..

Kata kunci: Partisipasi, Pengembangan, Masyarakat Lokal, Objek Wisata.

ABSTRACT

Nurul Utami, E031181329 "Local Community Participation in the Development of Tourism Objects in Tompo Bulu Village, Balocci District, Pangkajene And Islands Regency", Supervised by Sultan, S.Sos., M.Si and Musrayani Usman, S.Sos., M.Si. Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine how local community participation in the development of tourist attractions in Tompo Bulu Village, Balocci District, Pangkajene and Islands Regency. Data collection was carried out in September 2022 using a quantitative approach. The sampling technique used was simple random sampling. The theory used is the theory of participation according to Arnstein (1969).

The results of this study reveal the involvement of the Tompo Bulu village community in the planning, implementation, and supervision stages. The form of participation of the Tompo Bulu village community in the development of tourist attractions. The benefits felt by the Tompo Bulu village community with the development of the tourist attraction.

Keywords: Participation, Development, Local Community, Tourism Objects.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	x
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR DIAGRAM	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengembangan Masyarakat Lokal	8
B. Pengembangan Objek Wisata	10
C. Partisipasi Masyarakat Terhadap Objek Wisata	16
D. Teori Partisipasi	19
E. Kerangka Pikir	24
F. Penelitian Terdahulu	25
G. Definisi Operasional	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Strategi Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30

C. Populasi dan Sampel	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data.....	33
F. Teknik Penyajian Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
A. Sejarah Singkat Desa Tompo Bulu	35
B. Peta Dan Kondisi Desa.....	45
1. Peta Desa	45
2. Kondisi Desa	46
C. Struktur Pemerintah Desa Tompo Bulu	50
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Karakteristik Responden	51
B. Partisipasi Masyarakat	54
BAB VI PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
A. Lampiran Kuesioner.....	79
B. Lampiran Dokumentasi Penelitian.....	84
C. Surat Izin Penelitian Dari Ptsp Provinsi Sulawesi Selatan.....	86
D. Surat Izin Penelitian Dari Ptsp Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan ...	87
E. Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	88
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	89
RIWAYAT PENDIDIKAN	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tangga Partisipasi Menurut Arnshtein.....	21
Gambar 2.2. Kerangka pikir partisipasi masyarakat.....	25
Gambar 4.1. Peta Desa Tompo Bulu.....	44
Gambar 4.2. Struktur Pemerintah Desa Tompo Bulu.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 4.1. Penggunaan lahan desa Tompo Bulu.....	48
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Desa Tompo Bulu.....	49
Tabel 5.1. Distribusi responden berdasarkan kelompok usia.....	52
Tabel 5.2. Distribusi responden berdasarkan pekerjaan.....	53
Tabel 5.3. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin.....	55
Tabel 5.4. Tempat wisata yang ingin dikunjungi kembali.....	57

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 5.1. Persentase responden sering melakukan perjalanan wisata.....	56
Diagram 5.2. Persentase responden memilih tempat wisata yang viral.....	57
Diagram 5.3. Persentase objek wisata yang sering dikunjungi responden di Desa Tompo Bulu.....	59
Diagram 5.4. Persentase responden mengetahui adanya objek wisata Gunung Batu Putih yang sedang di kembangkan di Desa Tompo Bulu.....	60
Diagram 5.5. Persentase responden dilibatkan dalam pengembangan objek wisata di Desa Tompo Bulu.....	61
Diagram 5.6. Persentase Keterlibatan responden dalam pengembangan objek wisata di Desa Tompo Bulu.....	62
Diagram 5.7. Persentase meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	63
Diagram 5.8. Persentase pemerintah mensosialisasikan pengembangan objek wisata di desa Tompo Bulu.....	64
Diagram 5.9. Persentase Responden keikut sertaan dalam kegiatan sosialisasi mengenai objek wisata	64
Diagram 5.10. Persentase saran dan kritikan responden didengar oleh pemerintah desa Tompo Bulu.....	65
Diagram 5.11. Persentase saran dan kritikan responden diterima dan dilaksanakan pemerintah desa Tompo Bulu.....	66
Diagram 5.12. Persentase fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengembangan objek wisata di desa Tompo Bulu.....	67
Diagram 5.13. Persentase responden berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata di desa Tompo Bulu.....	68
Diagram 5.14. Persentase responden diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan objek wisata.....	70
Diagram 5.15. Persentase objek wisata dikelola oleh masyarakat desa Tompo Bulu.....	71

Diagram 5.16. Persentase objek wisata bermanfaat untuk masyarakat desa Tompo Bulu.....	72
Diagram 5.17. Persentase manfaat objek wisata menurut responden.....	73
Diagram 5.18. Persentase bentuk partisipasi responden dalam pengembangan objek wisata.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

A. Lampiran Kuesioner.....	79
B. Lampiran Dokumentasi Penelitian.....	84
C. Surat Izin Penelitian Dari Ptsp Provinsi Sulawesi Selatan.....	86
D. Surat Izin Penelitian Dari Ptsp Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan ...	87
E. Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	88

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki beraneka ragam jenis pariwisata, misalnya wisata alam, sosial maupun wisata budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Selain menyimpan berjuta pesona wisata alamnya begitu indah, Indonesia juga kaya akan wisata budayanya yang terbukti dengan begitu banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah serta keanekaragaman seni dan adat budaya masyarakat lokal yang menarik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, sehingga dengan banyaknya potensi yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai salah satu daerah tujuan wisata (Dery & Soemanto, 2017)

Saat ini pariwisata berkembang pesat dengan berbagai jenis pilihannya, diantaranya adalah pariwisata minat khusus. Wisata minat khusus adalah bentuk perjalanan wisata, dimana wisatawan mengunjungi suatu tempat karena memiliki minat khusus dari objek atau kegiatan di daerah tujuan wisata. Para wisatawan yang cenderung berwisata berdasarkan minat khusus ini biasanya dilakukan dengan beberapa alasan yaitu menghargai alam, mencari tahu tentang budaya, sejarah, lingkungan, adat istiadat serta tradisi yang berkembang (Rahmatillah, Insyah, Nurafifah, & Hirsan, 2019).

Indonesia yang merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah ruah mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan terutama wisata alam. Penilaian terhadap suatu kawasan wisata memiliki peranan yang dapat menentukan pengembangan dari tempat wisata itu sendiri yang mencakup berbagai faktor yang berkaitan dengan nilai sosial dan politik. Pengembangan objek wisata lebih berorientasi ke objek wisata alternatif dan objek wisata ekonomi, sudah dirasakan bahwa dari tahun ke tahun jumlah wisatawan internasional terutama yang mengunjungi Indonesia terus meningkat sehingga dihadapkan pada persoalan untuk menata produk-produk wisata sehingga dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung. Salah satu potensi sumber-sumber penerimaan daerah yang memiliki peluang dan prospek yang tinggi adalah sektor objek wisata.

Sektor pariwisata telah ditetapkan sebagai bisnis unggulan nasional yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi seperti membuka pariwisata dan membuka peluang usaha hulu-hilir kegiatan pariwisata. Salah satu prinsip kepariwisataan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah memberdayakan masyarakat setempat karena masyarakat berhak berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan dan berkewajiban menjaga dan melestarikan daya tarik wisata serta membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Kejenuhan terhadap bentuk wisata modern dan ingin kembali

merasakan kehidupan di alam pedesaan serta berinteraksi dengan masyarakat dan aktifitas sosial budayanya menyebabkan berkembangnya pariwisata di daerah-daerah pedesaan yang dikemas dalam bentuk desa wisata (Frasawi & Ananda Citra, 2018).

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat atau kelompok yang ikut memberikan kontribusi atau sumbangan dalam bentuk apapun itu yang dapat menunjang keberhasilan suatu program/kegiatan yang dilakukan. Partisipasi bertujuan memberdayakan masyarakat, memberikan ruang bagi individu yang menjadi target pembangunan untuk terlibat secara penuh dalam proses pembangunan sehingga mampu mengembangkan kapasitas dan memperbaiki kehidupannya. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga, biaya, dan dukungan. (Saputra, 2019)

Partisipasi yang ideal diharapkan semua elemen masyarakat dapat berjalan bersama-sama, dimana masyarakat yang mengemukakan pemikirannya, karena hal inilah yang akan menjadi fondasi untuk memenuhi objek wisata. Apa yang masyarakat rasakan itulah yang kemudian kemukakan, dan ini disebut suatu bentuk partisipasi. Peran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mengemukakan keinginan masyarakat dalam pengembangan objek wisata di wilayah desa yang dijadikan sebagai desa wisata. Untuk keberlangsungan dan keberhasilan peran partisipasi masyarakat merupakan ujung tombak kebijakan guna meningkatkan ekonomi masyarakat baik ditingkat lokal maupun global.

Salah satu daerah yang memiliki kebutuhan untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2014-2025, memiliki Visi “Kepariwisataan Kabupaten Pangkajene & Kepulauan yang berbasis kepada wisata bahari dan ekowisata yang berdaya saing dan berwawasan Global pada tahun 2025”. Kabupaten Pangkep mempunyai sumber daya dan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan daerah di bidang pariwisata, mengingat Kabupaten Pangkep yang juga diberi julukan “kota tiga dimensi” karena keunikan struktur wilayahnya yang mencakup daratan, pegunungan, hingga kepulauan. Dengan mengembangkan pariwisata tersebut secara optimal maka akan memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan tercapai. Berdasarkan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 tentang Penetapan Obyek Wisata Pangkep, menunjukkan bahwa Kabupaten Pangkep setidaknya tercatat memiliki total 61 obyek wisata yang terdiri dari 19 wisata bahari, 2 wisata agro boledong, 2 wisata sungai, 2 wisata budaya, 7 wisata religi, 26 wisata alam, dan 3 wisata kuliner. Keseriusan Pemerintah untuk memberi penguatan pada sektor pariwisata Kabupaten Pangkep dapat dilihat dengan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kepariwisataan. Berdasarkan hal tersebut, sektor pariwisata di

Kabupaten Pangkep seharusnya bisa menjadi sektor yang berperan penting dalam perekonomian daerah, utamanya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep itu sendiri.

Sebanyak 18 desa wisata di provinsi Sulawesi Selatan yang menembus 300 besar ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022 Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf RI), Desa Wisata Balleangin yang berada di Kelurahan Balleangin Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep menjadi satu-satunya desa yang masuk dan diakui oleh Kemenparekraf RI di Kabupaten Pangkep. Sedangkan Desa Tompo Bulu juga merupakan salah satu wilayah yang memiliki beberapa objek wisata yang masih belum banyak diketahui oleh wisatawan, maka dari masyarakat desa tompo bulu dan pemerintah desa sedang melaksanakan pengembangan terhadap potensi-potensi yang ada di desa tersebut untuk menjadika Desa Tompo Bulu menjadi Desa Wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dan diakui oleh Kemenparekraf RI.

Objek Wisata di Desa Tompo Bulu ada Taman Wisata Lembang Desa Tompo Bulu yang baru diresmikan oleh wakil bupati Pangkep pada tanggal 7 Oktober 2021. Adapaun tempat wisata lainnya yakni gunung Bulusaraung yang tidak lagi asing bagi wisatawan dan air terjun Tombolo, Gunung Bulutana, Susur 9 Gua yakni Gua Panrang, Gua Passosoang Tunabaka, Gua Parang Bo'bo, Gua Tamangngombang, Gua Marakallang, Gua Paenre, Gua Kasaballang, Gua Alluka, dan Gua Batukkana yang masih belum diketahui oleh masyarakat luar. Saat ini di

Desa Tompo Bulu sedang mengembangkan objek wisata yang baru yakni Gunung Batu Putih yang merupakan tempat Camping dengan pemandangan yang indah dan alami, dalam hal ini objek wisata tersebut masih dalam proses pembangunan menggunakan strategi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal karena masyarakat lokal sebagai salah satu faktor vital dalam pengembangan objek wisata. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul :

“Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Objek Wisata Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi masalah yang dijadikan sasaran penelitian, yaitu: Bagaimana partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan objek wisata di desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah: Untuk mengetahui partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan objek wisata di Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, yakni:

- 1) Bagi Mahasiswa/Pelajar diharapkan dapat digunakan sebagai dasar studi lanjutan yang dapat dikaji dan di kembangkan lebih lanjut khususnya optimalisasi kawasan wisata yang terkait karena memberikan manfaat positif bagi partisipasi dalam pengembangan objek wisata.
- 2) Bagi masyarakat Kabupaten Pangkep khususnya di Desa Tompo Bulu, tentang sektor industri pariwisata. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dalam mengembangkan, pengelolaan dan menjaga objek-objek wisata. Memberi masukan kepada tokoh masyarakat, pemerintah, dinas pariwisata, dan seluruh lembaga terkait di Desa Tompo Bulu Kabupaten Pangkep, mengenai pentingnya pengembangan sektor industri pariwisata sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 3) Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi Pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Pangkep dalam upaya perencanaan dan pengembangan kawasan wisata khususnya pada objek wisata yang ada di Desa Tompo Bulu Kabupaten Pangkep.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengembangan Masyarakat Lokal

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggung-jawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik dan pembelajaran terus-menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka (Zubaedi, 2013).

Semua kegiatan pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya dan partisipatisi. Pengembangan masyarakat meliputi usaha memperkuat interaksi sosial dalam masyarakat, menciptakan semangat kebersamaan, soliditas di antara anggota masyarakat dan membantu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak lain dengan cara

berdialog secara alamiah atau tanpa intervensi, didasari penuh pemahaman dan ditindak-lanjuti dengan aksi sosial nyata (Zubaedi, 2013).

Pengembangan masyarakat dalam konteks ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat lapis bawah dalam mengidentifikasi kebutuhan, mendapatkan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan serta memberdayakan mereka secara bersama-sama. Dengan gerakan ini, masyarakat lapis bawah bisa memiliki kendali secara kuat terhadap kehidupannya sendiri. Orang-orang ikut serta dalam kegiatan pengembangan masyarakat sepanjang waktu, misalnya sebagai pekerja yang dibayar, aktivis masyarakat, pekerja dalam layanan kemanusiaan dan anggota kepanitiaan masyarakat lokal yang tidak dibayar (Zubaedi, 2013).

Setiap program pengembangan masyarakat dirancang untuk mendorong pengembangan sumber daya, ketrampilan dan peluang untuk hidup secara lebih baik bagi rakyat kecil. Setiap upaya mengatasi kesenjangan dan alienasi sosial dilaksanakan oleh para aktivis sosial dengan menggunakan outreach methods (kegiatan keorganisasian yang sifatnya melakukan kontak, memberikan pelayanan dan pendampingan kepada anggota masyarakat). Cara ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi warga dalam berbagai kegiatan masyarakat yang berorientasi untuk memperbaiki kondisi kehidupannya. Salah satu tujuan pengembangan masyarakat adalah membangun sebuah struktur masyarakat yang di dalamnya memfasilitasi tumbuhnya partisipasi secara demokratis ketika terjadi pengambilan keputusan. Upaya ini menuntut

pembentukan proses yang memungkinkan sebuah masyarakat mempunyai akses kepada sumber daya, mampu mengontrol sumber daya dan struktur kekuasaan di masyarakat (Zubaedi, 2013).

B. Pengembangan Objek Wisata

Merujuk kepada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019, kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi diberikan tugas untuk melaksanakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa-desa mandiri yang berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Objek wisata atau desa wisata merupakan salah satu alat efektif untuk mendorong pembangunan yang inklusif, hal ini disebabkan desa berbasis pariwisata mempunyai karakteristik berupa potensi dan kekuatan yang melekat, yaitu:

a. In-situ

Dalam objek wisata atau desa wisata transaksi hanya dimungkinkan manakala wisatawan mendatangi atau mengunjungi tempat dimana produk wisata dihasilkan, sehingga dampak positif pengembangan dan pembangunan objek wisata yang berupa

pembelajaan wistawan akan mengalir secara langsung pada masyarakat. Dengan kata lain pariwisata adalah intrusmen program pemerataan dan penyebaran pertumbuhan yang sangat efektif.

b. Rantai nilai ke depan dan ke belakang yang sangat panjang

Transaksi didalam objek wisata atau desa wisata akan mampu menumbuhkan rantau nilai tambah kedepan dan ke belakang yang sangat panjang, sehingga mampu mendongkrak kegiatan ekonomi terkait yang sangat besar.

c. Usaha yang berbasis daya lokal (*local resource based industry*)

Karakteristik industri pariwisata dan budaya yang sangat ramah pada penyerapan sumber daya lokal serta sifatnya yang padat karya akan sangar efektif dalam menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha di daerah. Berpijak dari sifat dan kekhasan serta besarnya potensi kekuatan pariwisata maka bidang ini sangat strategis menjadi penggerak ekonomi masyarakat (Tanaya, 2019)

Potensi wisata adalah segala hal dalam keadaan baik yang nyata dan tidak dapat diraba yang digarap, diatur dan disediakan sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat atau dimanfaatkan, diwujudkan sebagai kemampuan faktor dan unsur yang diperlukan atau menentukan pengembangan kepariwisataan, baik itu berupa suasana, kejadian, benda maupun layanan atau jasa-jasa. Pada hakekatnya pengembangan adalah suatu proses untuk memperbaiki dan meningkatkan sesuatu yang ada. Pengembangan obyek wisata merupakan kegiatan membangun,

memelihara, dan melestarikan pertanaman, sarana dan prasarana maupun fasilitas lainnya. (Heryati, 2019)

Fandeli (1995) mengemukakan bahwa pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah pengembangan masyarakat dan wilayah yang didasarkan pada:

1. Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas dan tradisi lokal.
2. Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis sekaligus mendistribusikan secara merata kepada penduduk lokal.
3. Berorientasi kepada pengembangan wisata berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi pada teknologi kooperatif.
4. Memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai agen penyumbang tradisi budaya dengan dampak negatif yang seminimal mungkin.

Dalam Undang-Undang R1 No 10 Tahun 2009 Pasal 6 dan 7, tentang pembangunan pariwisata disebutkan bahwa pembangunan pariwisata haruslah memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata (Pasal 6). Pembangunan pariwisata meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata (Pasal 7). Menurut

Edward (1991), mengatakan bahwa suatu objek wisata harus mempunyai 5 unsur penting, yaitu:

1. Daya tarik merupakan faktor utama yang menarik wisatawan mengadakan perjalanan mengunjungi suatu tempat, baik suatu tempat primer yang menjadi tujuan utamanya, atau tujuan sekunder yang dikunjungi dalam suatu perjalanan primer karena keinginannya untuk menyaksikan, merasakan, dan menikmati daya tarik tujuan tersebut. Sedangkan daya tarik sendiri dapat diklasifikasikan kedalam daya tarik lokasi yang merupakan daya tarik permanen.
2. Prasarana Wisata ini dibutuhkan untuk melayani wisatawan selama perjalanan wisata. Fasilitas ini cenderung berorientasi pada daya tarik wisata di suatu lokasi, sehingga fasilitas ini harus terletak dekat dengan objek wisatanya. Prasarana wisata cenderung dapat mendukung kecenderungan perkembangan pada saat yang bersamaan.
3. Sarana Wisata, Sarana Wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

4. Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik diatas permukaan tanah dan dibawah tanah, seperti: sistem pengairan, sumber listrik dan energi, sistem jalur angkutan dan terminal, sistem komunikasi, serta sistem keamanan atau pengawasan.

5. Masyarakat, Lingkungan, dan Budaya Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik wisata akan mengundang kehadiran wistawan.

Pengembangan objek wisata adalah sebuah kegiatan dalam rangka menata dan memajukan dan mengembangkan menjadi lebih baik dan lebih layak. Pengembangan objek wisata alam sangat erat kaitannya dengan peningkatan sumber daya alam dalam konteks pembangunan ekonomi, sehingga sering melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah daerah, aspek masyarakat, dan pihak swasta di dalam suatu sistem tata ruang wilayah.

Pengembangan sebuah objek wisata sebaiknya memperhatikan prinsip dasar pengembangan. Idealnya pengembangan suatu wisata berlandaskan pada 4 prinsip dasar sebagai berikut (Yoeti,2006) pertama adalah keberlangsungan ekologi, yaitu sebuah pengembangan pariwisata harus mampu menjamin adanya pemeliharaan dan proteksi sumber-sumber. Kedua, keberlangsungan kehidupan dan budaya, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat

dalam pengawasan tata kehidupan melalui nilai-nilai yang telah diciptakan dan dianut bersama sebagai identitas dan kemandirian. Ketiga keberlangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin adanya kesempatan bagi semua pihak untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi melalui suatu kompetisi yang ketat. Keempat, memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan kepariwisataan.

Dalam pengembangan objek wisata alam tentunya terdapat beberapa kendala, seringkali kendala pengembangan tersebut berkaitan erat dengan instrumen kebijakan dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi kawasan untuk mendukung potensi objek wisata alam, efektifitas fungsi dan peran objek wisata alam ditinjau dari aspek kerjasama instansi terkait, kapasitas institusi dan kemampuan SDM dalam pengelolaan objek wisata alam kawasan hutan, dan mekanisme peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata alam. Oleh sebab itu untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan adanya beberapa elemen dalam proses pembangunan objek wisata, diantaranya, pengelolaan objek wisata. Pengelolaan suatu objek wisata biasanya dapat dilakukan dengan adanya pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah tersedia di dalam objek wisata tersebut. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk sarana pengelolaan pariwisata:

1. Sarana pariwisata pokok.
2. Sarana pariwisata pelengkap.

3. Sarana pariwisata penunjang.

Selain itu juga ada pengelompokan sarana lain yang merupakan faktor utama dalam wisata, diantaranya adalah:

1. Hotel.
2. Rumah makan.
3. Lingkungan objek wisata.

C. Partisipasi Masyarakat Terhadap Objek Wisata

Indonesia saat ini sudah banyak mengembangkan objek wisata di perdesaan guna mengurangi kemiskinan masyarakat di desa. Pemerintah melibatkan masyarakat dan *stakeholder* utama dalam mengembangkan objek wisata di perdesaan. Pembangunan objek wisata harus melibatkan masyarakatnya, objek wisata tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik jika tidak ada kontribusi aktif dari masyarakat setempat.

Dampak pengembangan objek wisata perdesaan bagi masyarakat bukan hanya sekedar meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut tetapi juga meningkatkan industri kerajinan setempat, menumbuh kembangkan kebudayaannya, kuliner tradisional dan juga melestarikan bangunan tradisional setempat. Jika lokasi desa itu merupakan daerah konservasi alam, ini juga merupakan salah satu faktor untuk melestarikannya (Tanaya, 2019).

Dalam pengembangan objek wisata yang perlu dipahami sejak awal bila masyarakat setempat bukan sebagai obyek pasif namun justru sebagai subyek aktif. Sebuah lingkungan perdesaan dapat dipandang

sebagai obyek sekaligus sebagai subyek wisata. Sebagai obyek wisata artinya desa tersebut merupakan tujuan kegiatan pariwisata sedangkan sebagai subyek adalah sebagai penyelenggara, apa yang dihasilkan oleh desa akan dinikmati oleh masyarakatnya secara langsung dan peran aktif masyarakat sangat menentukan kelangsungannya (Soebagyo, 1991).

Dalam kerangka pembangunan dan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi mengacu pada pengembangan objek wisata berbasis masyarakat. Model pendekatan yang dikembangkan meliputi 3 (tiga) gugusan (*cluster*) sebagai berikut:

a. Model Gugusan Desa Wisata – Desa Terkait

Model gugusan desa wisata – desa terkait merupakan model pengembangan yang menempatkan desa wisata sebagai pusat pengembangan dan penerima dana desa, sedangkan desa-desa atau masyarakat disekitarnya menjadi *stakeholder* dalam pengembangan kawasan perdesaan berbasis wisata.

b. Model Gugusan Daya Tarik Wisata – Desa Terkait

Model gugusan daya tarik wisata – desa terkait merupakan model pengembangan yang menempatkan daya tarik wisata sebagai pusat pengembangan, sedangkan desa-desa atau masyarakat di sekitarnya menjadi penerima manfaat langsung pembangunan desa wisata.

c. Model Gugusan Usaha Pariwisata – Desa Terkait

Model gugusan usaha pariwisata – desa terkait merupakan model pengembangan desa-desa yang berada di sekitar lokasi usaha pariwisata, seperti hotel, resort, dan rumah makan/restoran, yang memiliki keterkaitan fungsi secara langsung maupun tidak langsung (Tanaya, 2019).

Dalam hubungan dengan evolusi sikap masyarakat terhadap wisatawan, Doxey (1976) sudah mengembangkan sebuah kerangka teori yang disebut irindex (irritation index). Model irredex dari Doxey menggambarkan sebuah perubahan sikap masyarakat lokal terhadap wisatawan secara linier. Sikap yang mula-mula positif berubah menjadi semakin negatif seiring dengan penambahan jumlah wisatawan. Tahapan-tahapan sikap masyarakat lokal terhadap wisatawan mulai dari euphoria, apathy, irritation, annoyance, dan antagonism.

1. *Euphoria*. Kedatangan wisatawan diterima dengan baik, dengan sejuta harapan. Ini terjadi di awal fase-fase awal perkembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, dan umumnya daerah tujuan wisata tersebut belum mempunyai perencanaan.
2. *Apathy*. Masyarakat menerima wisatawan sebagai sesuatu lumrah, dan hubungan antara masyarakat dengan wisatawan didominasi oleh hubungan komersial. Perencanaan yang dilakukan pada daerah tujuan wisata pada fase ini umumnya hanya menenkankan pada aspek pemasaran.

3. *Annoyance*. Titik kejenuhan sudah hampir dicapai dan masyarakat mulai terganggu dengan kehadirana wisatawan. Perencanaan umumnya berusaha meningkatkan prasarana dan sarana, tetapi belum ada usaha membatasi pertumbuhan.
4. *Antagonism*. Masyarakat secara terbuka sudah menunjukkan ketidaksenangannya, dan melihat wisatawan sebagai sumber masalah. Pada saat ini perencana baru menyadari pentingnya perencanaan menyeluruh (Pitana & Gayatri, 2005).

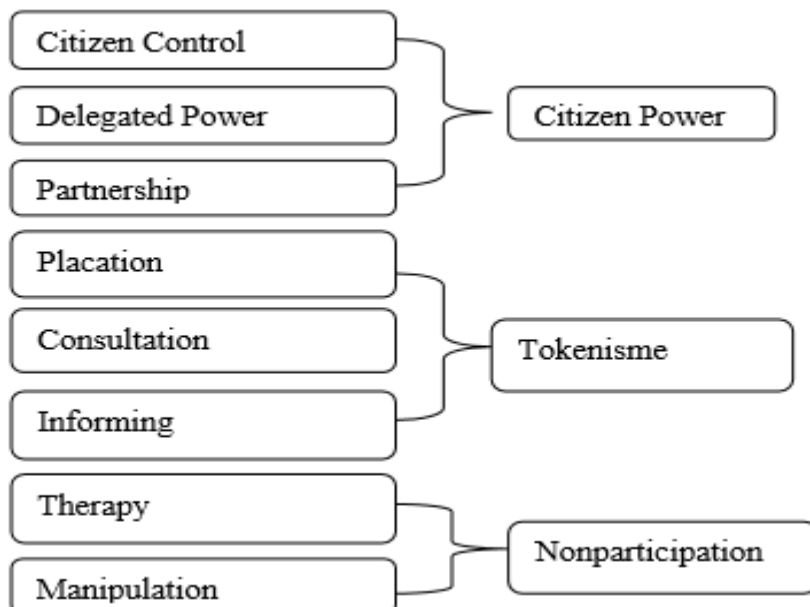
D. Teori Partisipasi

Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya pembagian ulang kekuasaan yang adil (*redistribution of power*) antara penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Partisipasi masyarakat tersebut bertingkat, sesuai dengan gradasi, derajat wewenang dan tanggung jawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan (Rosyida & Nasdian, 2011).

Arnstein (1969) merupakan orang yang pertama kali mendefinisikan strategi partisipasi yang didasarkan pada distribusi kekuasaan antara masyarakat (komunitas) dengan badan pemerintah (*agency*). Partisipasi masyarakat identik dengan kekuasaan masyarakat (*citizen participation is citizen power*), Arnstein menggunakan metafora tangga partisipasi, setiap anak tangga mewakili strategi partisipasi yang berbeda yang didasarkan pada distribusi kekuasaan. Tangga terbawah merepresentasikan kondisi tanpa partisipasi (*non participation*), meliputi:

manipulasi (*manipulation*) dan terapi (*therapy*). Pemberitahuan (*informing*), konsultasi (*consultation*), penentraman (*placation*), ketiga tangga menggambarkan tingkatan tokenisme (*degree of tokenism*). Tokenisme dapat diartikan sebagai kebijakan sekadarnya, berupa upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan. Kemitraan (*partnership*), pendelegasian wewenang (*delegated power*), dan pengendalian masyarakat (*citizen control*), tiga tangga terakhir ini menggambarkan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan yang oleh Arnstein dianggap sebagai bentuk sesungguhnya dari partisipasi masyarakat. Perhatikan gambar di bawah ini;

Gambar 2.1. Tangga Partisipasi Menurut Arnstein



Sumber : Arnstein (1969)

Tangga partisipasi menurut Arnstein (1969) di atas dapat diuraikan secara berjenjang dari bawah ke atas sebagai berikut.

1. *Manipulation* (Manipulasi)

Di level ini masyarakat tidak dilibatkan dikarenakan sudah terpilihnya sejumlah orang sebagai wakil dari masyarakat. Sehingga masyarakat tidak akan mengetahui sama sekali tentang informasi keputusan tersebut. Tangga partisipasi ini relatif tidak ada komunikasi dan dialog, tujuan sebenarnya bukan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi untuk mendidik partisipan.

2. *Therapy* (Terapi)

Pada level ini masyarakat mulai dilibatkan tetapi hanya dapat mendengarkan informasi keputusan tersebut. Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah. Contoh kasus di negara Korea Utara yaitu masyarakat tidak memiliki kebebasan dan hanya mendengarkan informasi.

3. *Informing* (Pemberitahuan)

Saat mulai masuk level *informing* otoritas berkuasa tidak menghalangi partisipasi tetapi tidak mengeksekusi aspirasi masyarakat. Pada level ini otoritas berkuasa hanya berkomunikasi searah atau hanya memberi tahu informasi yang akan dan sudah dilaksanakan.

Pada jenjang ini komunikasi sudah mulai banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Informasi telah

diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan tanggapan balik (*feed back*).

4. *Consultation* (Konsultasi)

Pada tangga partisipasi ini komunikasi telah bersifat dua arah, tapi masih bersifat partisipasi yang ritual. Sudah ada penjaringan aspirasi, telah ada aturan pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat akan didengarkan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi.

Untuk tingkat ini sudah adanya diskusi dengan banyak elemen tetapi yang berkuasa menentukan apakah saran dan kritik masyarakat akan digunakan. Contoh kasusnya yaitu forum diskusi perumusan kebijakan yang diadakan pemerintah dengan mengundang berbagai stakeholder.

5. *Placation* (Penetraman)

Selanjutnya pada tingkat *placation*, pihak yang berkuasa hanya berjanji untuk melaksanakan aspirasi atau saran masyarakat tetapi diam – diam menjalankan rencana semula.

Pada level ini komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun pemerintah tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan tersebut.

6. *Partnership* (Kemitraan)

Lalu pada tingkat *partnership* telah mencapai *citizen power*, sehingga pada level ini terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program.

Pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk bernegosiasiai dan melakukan kesepakatan.

7. *Delegation power* (Pendelegasian Kekuasaan)

Bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberhasilan program.

8. *Citizen Control* (Kontrol Masyarakat)

Dalam tangga partisipasi ini, masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan pemerintah.

Dan untuk tingkat *Citizen Control*, dimana masyarakat yang lebih mendominasi dan peran masyarakat hingga pemerintah mengevaluasi

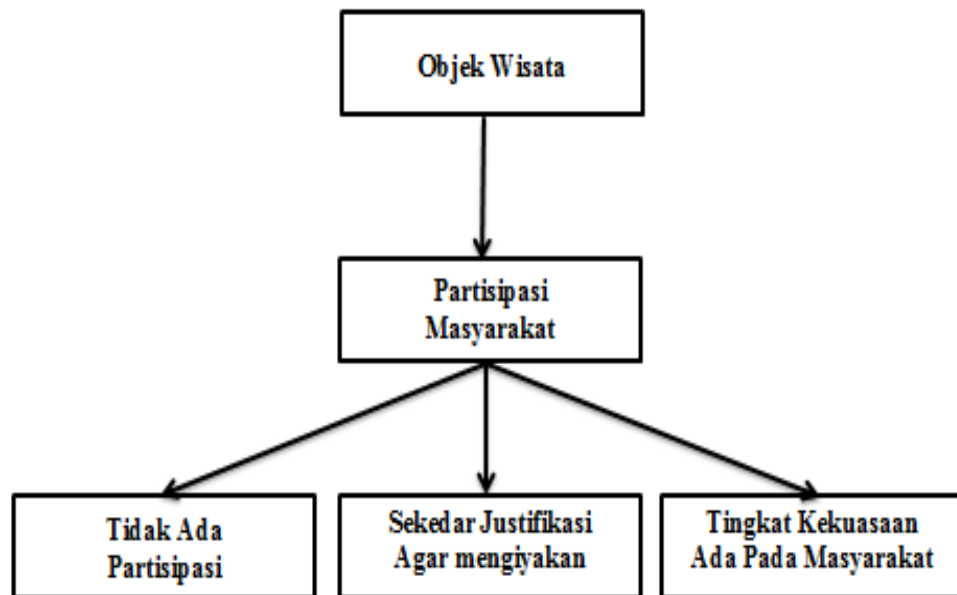
kinerja mereka. Menurut Arnstein jika partisipasi berada pada level ini maka terbentuknya partisipasi publik ideal (Arnstein, 1969).

E. Kerangka Pikir

Pengembangan objek wisata di desa bisa dikatakan berhasil bila masyarakat diikut sertakan dalam hal menyuarkan saran dan kritikan dan pengambilan keputusan karena ini menyangkut dampak yang terjadi pada keseharian masyarakat mulai dari adat istiadat, budaya, lingkungan, dan ekonomi. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata adalah peranan atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pengembangan atau pembangunan objek wisata tertentu, baik itu secara fisik atau non fisik. Dalam hal ini masyarakat bukan hanya sekedar penikmat wisata, tetapi masyarakat juga berkewajiban memberikan sumbangsi pemikiran, ataupun ikut serta dalam memperhatikan ketertiban dan kenyamanan pada objek wisata.

Objek wisata di Desa Tompo Bulu selain panoramanya yang indah objek wisata ini memberikan dampak ekonomi seperti pendapatan dan kesempatan kerja pada masyarakat sekitarnya. Tentunya dalam pengembangan tersebut tidak semata-mata berkat kinerja pihak pengelola saja melainkan juga dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengembangannya.

Gambar 2.2. Kerangka pikir partisipasi masyarakat



F. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Masriana	Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism) di pantai Ide Sorowako. Kec.Nuha Kab. Luwu Timur	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Mengikuti setakan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengembangan objek wisata. Masyarakat juga dapat merasakan peningkatan ekonomi dan tetap memelihara karakter dan budaya lokal masyarakat setempat.

2.	Herlinda	Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan objek wisata Taman Batu di Kelurahan Balleangin Kabupaten Pangkep	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Masyarakat sebagai komponen utama dalam pengembangan objek wisata dalam hal potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya, ataupun ekonomi masyarakat.
3.	Asni	Partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata alam Bantimurung Kelurahan Kalabbirang Kabupaten Maros	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Masyarakat Kurang Ikut berpartisipasi dalam pengembangan Objek Wisata Alam Bantimurung karena faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan tentang pariwisata. Hambatan partisipasi masyarakat Kelurahan Kalabbirang adalah rendahnya kemampuan, pengalaman, pendidikan, serta kreatifitas dari masyarakat dalam bidang pariwisata, selain itu kesadaran

				masyarakat terhadap pariwisata juga yang minim.
--	--	--	--	---

G. Definisi Operasional

Menurut (Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 2012), definisi operasional adalah penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variable yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan kontrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran kontrak yang lebih baik.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi operasional adalah definisi yang didasarkan pada sifat variable yang diamati dan mencakup hal-hal penting dalam penelitian yang memerlukan penjelasan spesifik dan rinci.

1. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari budaya bangsa kita yang senantiasa menempuh pendekatan musyawarah untuk mufakat dalam mencari jalan keluar serta pengambilan keputusan bersama. Dengan kata lain, apapun yang menjadi hasil ataupun keputusan musyawarah mufakat tersebut sudah menjadi tanggung jawab bagi semua peserta musyawarah dalam konteks ini adalah masyarakat. Sehingga keikutsertaan masyarakat tersebut

menumbuhkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan khususnya pelaksanaan program pembangunan di Desa.

2. Objek wisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Objek wisata adalah ciri khas suatu daerah yang ditunjang oleh keadaan alam dan budaya suatu daerah. Dalam literature kepariwisataan luar negeri objek wisata dikenal dengan: “*Tourism attraction*” yang segala sesuatu menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah.
3. *Stakeholder* yakni terlibat mempengaruhi dan mengendalikan pengembangan di tempat mereka masing-masing. Masyarakat turut serta secara aktif dalam memprakasai (memelopori) kehidupan mereka, melalui proses pembuatan keputusan dan perolehan memberdaya dan penggunaannya.
4. Pengembangan objek wisata, (Philip, 2002) menyatakan bahwa pengembangan objek wisata ditujukan untuk mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, membangun daerah, memperkenalkan alam dan budaya bangsa.